

RESEARCH ARTICLE

Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi

Ratna Dian Utami Putri ✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jawa Tengah, Indonesia

✉ ratnadup@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Today's era, digital development has brought the political world into a revolutionary phase that has given rise to new platforms to convey public opinion in various public activities, including the emergence of social media which is able to develop rapidly into a vital platform for community activities, especially in conducting public conversations and other social interactions online. This social media provides an opportunity for people to share information and exchange opinions, in the political landscape social media has a number of significant implications, especially in the world of democracy where the emergence of buzzers is one of the new phenomena that is considered increasingly troubling. The purpose of the research in this journal is to explore and analyze more comprehensively the relationship between the dynamics of the discussion of political issues on social media in the phenomenon of the emergence of political buzzers as well as the relationship with the impact caused by the activities of a group of buzzers on the ongoing democracy. The research method in this journal uses a descriptive qualitative method with results and findings stating that social media as a public discussion platform where buzzers are one of the phenomena that can control the flow of political conversations in community democratic activities. The presence of buzzers brings a number of implications in the form of new challenges and threats to the world of democracy that must be addressed immediately with real regulations that are able to coordinate the complexity of the dynamics of political buzzing on social media.

Keywords: Social Media, Political Discussion, Buzzers, Democracy.

ABSTRAK

Era dewasa ini, perkembangan digital telah membawa dunia politik kedalam fase revolusi yang memunculkan platform-platform baru untuk menyampaikan opini masyarakat dalam berbagai aktivitas publik, tidak terkecuali kemunculan media sosial yang mampu berkembang pesat menjadi sebuah platform vital bagi aktivitas masyarakat khususnya dalam melakukan perbincangan publik dan interaksi sosial lainnya secara online. Media sosial ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berbagi informasi dan bertukar pendapat, dalam lanskap politik media sosial memberikan sejumlah implikasi signifikan khususnya didunia demokrasi di mana kemunculan *buzzer* menjadi salah satu fenomena baru yang dinilai semakin meresahkan. Tujuan penelitian dalam jurnal ini ialah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara lebih komprehensif keterkaitan antara dinamika perbincangan isu

politik dimedia sosial dalam fenomena munculnya oknum *buzzer* politik juga keterkaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas sekelompok *buzzer* tersebut terhadap demokrasi yang sedang berjalan. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil dan temuan yang menyatakan bahwa media sosial sebagai sebuah platform diskusi publik di mana *buzzer* menjadi salah satu fenomena yang mampu memegang kendali arus perbincangan politik pada aktivitas demokrasi masyarakat. Kehadiran *buzzer* membawa sejumlah implikasi berupa tantangan dan ancaman baru bagi dunia demokrasi yang harus segera ditangani dengan regulasi-regulasi nyata yang mampu mengkoordinir kekompleksitasan dinamika *buzzing* politik di media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Diskusi Politik, Buzzer, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini bersangkutan dengan munculnya kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi yang telah memberikan perubahan secara kilat seiring berjalannya waktu seiring semakin berkembangnya zaman. Salah satu inovasi paling signifikan yang telah banyak mengubah kehidupan manusia adalah kemunculan internet. Internet telah membuka jalan bagi era transformasi digital di berbagai sektor mulai dari komunikasi, pendidikan, perdagangan hingga politik dalam sebuah negara dengan peran dan dampaknya yang besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi secara online. Tidak menutupi kemungkinan keberadaan internet juga memberikan implikasi kepada aktivitas-aktivitas publik secara langsung di kehidupan rill mereka.

Banyaknya platform online yang bermunculan akibat adanya internet juga menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Terciptanya platform-platform baru seperti media sosial menjadi salah satu contoh yang nyata terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi internet sekarang. Media sosial seperti Instagram, X, Facebook, dan Tiktok telah menjadi platform yang memfasilitasi komunikasi publik dan interaksi sosial secara online. Media sosial ini juga memberikan ruang bagi masyarakat penggunanya untuk beraktivitas secara online sehingga memungkinkan mereka untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan membentuk komunitas tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu yang ada. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagaimana apa yang telah disebutkan sebelumnya tetapi media sosial juga digunakan untuk memfasilitasi berbagai hal seperti untuk menerima dan membagikan konten-konten baik hiburan dan kontek lainnya, membangun bisnis, menjalankan kampanye, melakukan promosi dan pemasaran, serta mengakses berita serta informasi teraktual.

Dampak positif dari kehadiran media sosial ini tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor di atas. Namun, juga beberapa faktor lainnya seperti kepraktisan penggunaan yang memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas digitalnya, kemudian kemudahan dan kefleksibilitasnya dalam mendapatkan akses ke media sosial tersebut juga turut membuat masyarakat semakin menggandrungi media sosial tersebut. Akses ke media sosial semakin mudah dengan adanya dukungan alat-alat canggih seperti *smartphone* yang semakin terjangkau dan konektivitas internet yang semakin luas. Setidaknya terdapat lebih

dari 4,2 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia, dengan penetrasi yang tinggi di wilayah-wilayah dengan akses internet yang baik.¹

Selain dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya media sosial dalam masyarakat dizaman sekarang ini, kehadiran media sosial juga turut menciptakan adanya tantangan-tantangan baru, ancaman serta risiko-risiko lain di masa depan. Isu-isu seperti *cybercrime*, penyebaran informasi palsu atau kita kenal sebagai hoax, ujaran kebencian atau *hate speech*, dan ketergantungan kepada teknologi digital tentunya juga perlu menjadi perhatian utama dalam berbagai bidang. Tidak terkecuali bidang politik yang menjadi salah satu bidang yang sering menyebabkan munculnya percikan-percikan pertikaian di media sosial pada era-era tertentu seperti pemilu. Lebih lanjut, media sosial juga telah menjadi bagian penting dalam dinamika diskusi politik khususnya secara online. Dengan media sosial, perbincangan atau diskusi dan debat politik yang menjadi semakin lebih terbuka luas dan akhirnya memunculkan kesempatan kepada berbagai kelompok terkait untuk berpendapat dan bersuara kepada masyarakat luas. Dibalik keunggulan tersebut, tentunya terdapat celah yang mampu dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal dalam menciptakan peluang mereka dalam mencapai target capainnya dengan cara yang tidak sehat.

Dalam lanskap politik hal tersebut dapat dilihat dari munculnya keberadaan *buzzer* yang aktif bersuara disosial media dalam aktivitas kampanye yang sedang berjalan. Praktik *buzzer* dengan memanfaatkan media sosial mayoritas bertujuan untuk mempersuasi masyarakat dan memanipulasi khalayak yang ada untuk turut mendukung propaganda yang telah diciptakan. Tidak hanya itu, aktivitas penyebaran informasi yang menyesatkan, dan konten yang bersifat menjatuhkan juga ikut bermunculan dan menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif. Opini publik yang semakin diadu domba oleh aktivitas *buzzing* oknum-oknum tertentu hanya untuk kepentingan Pemilu tentunya menjadi hal yang harus dikritisi secara lebih mendalam lantaran hal tersebut juga mengancam integrasi bangsa didalam negara terkait. Implikasi negatif dari adanya aktivitas *buzzing* ini terhadap dunia politik dan aturan demokrasi tentulah sangat signifikan. Penyebaran hoax secara terang-terangan dan tindakan penggiringan opini publik secara manipulatif tentunya akan menciptakan polarisasi di masyarakat, memperburuk persepsi terhadap institusi demokratis, dan merusak prinsip-prinsip dalam pemilu. Selain itu, penggunaan *buzzer* untuk mendiskreditkan lawan politik dengan menyulut opini-opini negatif seperti ujaran kebencian juga memberikan ancaman pada stabilitas sosial dalam bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan praktik untuk oknum *buzzer* dalam diskusi politik penting dilakukan untuk menjamin aksi politik yang sehat dan demokrasi yang tepat. Memang, ditengah-tengah era modernisasi ini, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tak bisa dibiarkan terlepas begitu saja dari pantauan. Manfaat kebebasan berpendapat sebagaimana sesuai dengan esensi dalam prinsip demokrasi pada sebuah negara demokrasi seperti Indonesia menyebabkan sejumlah gejolak yang serius timbul dalam berbagai aktivitas warga negaranya. Menjadi negara berbasis demokrasi disisi lain membuka hak berpendapat dan bersuara warga negara secara adil dan beradab juga menempatkan negara dan rakyatnya pada risiko kesewenangan oknum dalam masyarakat

¹ Hootsuite and We Are Social. (2021). Digital in 2021: Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use In Indonesia. Retrived <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>.

yang seenaknya dalam bertindak hingga dapat merusak tatanan hidup bangsa dan negara akibat dari tindakan-tindakan intimidatif, manipulatif, provokatif serta radikalisme yang dilakukannya. Oknum-oknum tersebut juga tidak terkecuali salah satunya *buzzer* politik yang marak melancarkan aksinya ketika masa pemilu akan segera diselenggarakan.

Selanjutnya, menurut situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sudah ada lebih dari 300 akun sosial media terpaksa diblokir oleh Bareskrim Polda Metro Jaya akibat aktivitas tidak etis yang telah dilakukan. Kemudian tidak hanya itu, tercatat jumlah sosial media yang melakukan aksi penyebaran berita hoax, provokasi, dan informasi negatif lainnya adalah sebanyak 800 ribu situs Indonesia yang juga telah ditindaklanjuti dengan upaya pemblokiran. Angka tersebut menunjukkan adanya Tindakan aktivitas media sosial negative yang cukup tinggi disisi lain keterkaitannya dengan buzzer dan dunia politik di Indonesia. Sehingga, didasarkan pada hal di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih luas akan bagaimana dinamika diskusi politik yang terjadi di dalam fenomena-fenomena kemunculan *buzzer* didalam kampanye modern di media sosial. Penelitian ini juga memiliki target capaian untuk mengetahui apa dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari aktivitas *buzzing* dengan menganalisis dampak *buzzer* dalam media sosial terhadap proses demokrasi yang berlangsung serta solusi yang dapat dilakukan.

METODE

Dalam penulisan jurnal ini metode penelitian yang digunakan ialah metode berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kasus kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan tetap mempertahankan kevalidan data terkait objek penelitian yang dibahas. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendeskripsikan fenomena Tindakan aksi kemunculan *buzzer* atau *buzzing* yang terjadi dalam diskusi politik serta pengaruh yang ditimbulkan dalam konteks demokrasi. Metode dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan pencarian berbagai sumber literatur oleh penulis tanpa melibatkan pengumpulan data dilapangan secara langsung dan lebih berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis yang relevan.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Pengenalan dan Konsep Dasar Buzzer

Buzzer memiliki makna secara etimologis yang berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti bel atau lonceng. Istilah *buzzer* sebenarnya mengandung konotasi yang positif dengan makna yakni penanda atau pengingat bagi beberapa orang untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas tertentu dengan cara menarik menarik perhatian orang tersebut.² Secara teori konseptual sendiri, *buzzer* diartikan sebagai seseorang yang menggunakan akun sosial

² Rieka Mustika, "Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial, Shifting the Role of Buzzer to The World of Politics on Social Media", dalam Jurnal Diakom, 2:2 (Desember, 2019), hlm. 152.

medianya untuk mempromosikan sesuatu baik itu jasa ataupun barang serta menyebarkan berbagai informasi ke masyarakat luas. Dengan aktivitas tersebut oknum *buzzer* juga dapat memperoleh penghasilannya. *Buzzer* ini biasanya dimanfaatkan dalam dunia bisnis khususnya dalam hal pelaksanaan *marketing* suatu produk. Tugas dari *buzzer* itu sendiri adalah menyebarkan informasi produk dengan mengunggah sejumlah postingan akan konten terkait produk serta melakukan sejumlah upaya persuasif kepada khalayak ramai di media sosial. Oleh karena itu, oknum *buzzer* ini memiliki kaitan erat dengan industri perdagangan dan mereka dapat dianggap sebagai seolah-olah adalah sebuah alat penjualan suatu produk dari perusahaan yang membayarnya. Umumnya para *buzzer* memiliki koneksi yang sangat memadai dalam bersosial media, Adapun karakteristik dan spesifikasi yang sering dimiliki oleh seorang *buzzer* ialah,

1. Memiliki akses jaringan dan informasi yang luas.
2. Memiliki keterampilan dalam hal pembuatan berbagai konten digital.
3. Handal dalam mengoperasikan teknologi dan media sosial.
4. Memiliki kemampuan jurnalistik dan komunikasi yang baik.
5. Dilandasi oleh motif tertentu seperti diberikan imbalan atau bahkan suka rela.

Buzzer juga memiliki sejumlah pembagian praturugas dalam melakukan aksinya di media sosial. Posisi yang pertama, yakni disebut dengan *Person in Charge* dan *PIC Support* yang bertugas untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan beserta sasaran dan strategi aksi yang dilakukan dengan cara mengukur segala aspek yang sudah dipantau sejak awal perencanaan. Bagian kedua yaitu *Content Writer* yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun narasi-narasi yang akan disebarkan ke khalayak masyarakat dengan memanfaatkan psikologi massa. Bagian terakhir yakni bagian ketiga yang merupakan admin dengan tugas memegang kendali dan melakukan pemantauan berkala pada seluruh aksi yang dilancarkan serta memperkuat penyebaran isu-isu yang telah diposting ke dalam ruang digital masyarakat luas. Tidak hanya ini, akhir-akhir ini para oknum *buzzer* juga marak melakukan *link sharing* ataupun *virtual community* untuk membuat isu yang dikampanyekan menjadi sebuah trending topik yang akan menarik perhatian masyarakat secara lebih luas lagi.

Menelusuri jejak *buzzer* dalam perkembangan era digitalisasi, pemaknaan *buzzer* oleh kebanyakan orang kini semakin bergeser dari sebelumnya. Dalam kamus Oxford, *buzzer* sendiri dimaknai sebagai “*an electrical devices that makes a busing noise and is use for signalling*” yang artinya adalah sebuah perangkat elektronik yang menimbulkan suara bising yang dalam kata lain merujuk pada sebuah kegiatan bersuara secara keras. Kemudian, berdasarkan definisi dan interpretasi pada kamus Oxford tersebut dapat diidentifikasi jikalau makna *buzzer* kini telah berbeda dari yang seharusnya dengan penyebab berupa pengaruh dari munculnya perkembangan media baru seperti Twitter yang kini dikenal sebagai X juga aplikasi-aplikasi media lainnya.³ Maka dari itu, sekarang ini *buzzer* lebih banyak dilabeli sebagai oknum-oknum yang memberikan aktivitas kicauan-kicauan keributan di dunia media sosial terhadap suatu produk atau topik yang sedang ia targetkan.

³ Firmansyah, Mas Agus, Siti Karlinah, dan Suwandi Sumartias, “Kampanye Pilpres 2014 dalam Konstruksi Akun Twitter Pendukung Capres”, dalam Jurnal the Messenger 9:1(2017), hlm. 79-90.

3.2 Kehadiran Fenomena Buzzer Politik

Melanjutkan hal di atas, kemunculan pemaknaan baru untuk *buzzer* ini tidak semata-mata pada pengertiannya saja. Namun, juga turut mempengaruhi munculnya jenis-jenis *buzzer* baru seperti salah satu contohnya yaitu *buzzer* politik. Fungsi dan tugas dari *buzzer* politik ini tidak jauh berbeda dari *buzzer marketing* yang sebelumnya telah dikenal lebih awal. Para *buzzer* politik ini mampu melakukan berbagai aksi dengan tujuan politis. Mereka mengolah berbagai narasi sebagai strategi untuk mengkampanyekan sebuah kandidat atau pihak sisi politik yang ia bela dengan menarik dengan menarik simpati dan kepercayaan publik yang juga telah dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan politik dan memenangkan partai politik yang ia bela. Di Indonesia sendiri, tindakan campur tangan *buzzer* sudah mulai terdeteksi sejak tahun 2006. Di mana dikala itu media sosial Twitter melakukan debutnya. Kemudian *buzzer* ini mulai menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik pada tahun 2012 yang saat itu berbarengan dengan dilaksanakan Pemilu DKI Jakarta.⁴

Perekrutan *buzzer* oleh partai-partai politik dilakukan guna meningkatkan persentase keberhasilan mereka dalam memenangkan pemilihan umum yang segera mereka lakukan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dengan adanya penggunaan media sosial yang ramai yang dijadikan media utama para *buzzer* politik untuk mengkampanyekan kandidatnya sangat mendukung terciptanya pemasaran menjadi sukses dan besar, benefit sosial media yang beragam seperti fitur postingan berupa teks, foto, ataupun video, kemudian fitur status dalam aplikasi, serta fitur-fitur lainnya menambah proses penyebaran aksi kampanye menjadi semakin mudah tercapai. Itulah mengapa di Indonesia, pada waktu-waktu tertentu terutama saat menjelang perhelatan Pemilu dan Pilkada basis pertumbuhan *buzzer* terpantau semakin meningkat.

3.3 Implikasi Aktivitas Buzzing oleh Buzzer terhadap Demokrasi

Terbit dan meroketnya aksi oleh para *buzzer* atau *buzzing* ini tentunya sangat memberikan kendali untuk para oknum *buzzer* dalam upaya mempengaruhi masyarakat publik baik dari sisi positif maupun negatif dalam ragam politik yang dijamahnya. Sisi positif yang diberikan ialah berupa terbangunnya citra positif kepada kandidat yang dipasarkan oleh *buzzer* tersebut, serta *buzzer* juga mampu memberikan pesan-pesan politik yang biasanya didukung dengan penyematan *hashtag* didalam postingan pesan tersebut, *buzzer* juga menciptakan adanya kerja sama dan kolaborasi yang akan memberikan sejumlah peluang terbuka bagi pihak-pihak seperti masyarakat untuk turun bekerja sama dan menemukan penghasilan atau kesenangannya. Namun, implikasi negative pastinya akan turut serta menemani praktik *buzzing* yang dilakukan utamanya dalam hal pendistribusian isu-isu yang bahkan bersifat radikal seperti memberikan informasi hoax, melakukan tindakan provokasi yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan-perdebatan politik yang tidak etis. Hal tersebut dikarenakan dalam cara berkomunikasi yang mereka lakukan dilakukan dengan menciptakan sejumlah isu-isu disinformasi atau kita kenal sebagai hoax secara masif dengan beberapa tindakan manipulasi yang mampu menciptakan peluang terjadinya konflik-konflik politik yang merugikan pihak-pihak politik tertarget.

⁴ Bambang Arianto, "Salah Kaprah Ihtwal Buzzer, Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial", dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5:1 (2020), hlm. 3.

Selain itu aktivitas *buzzer* ini juga melibatkan amplifikasi pesan yang mana *buzzer* melakukan hal tersebut dengan maksud memberikan peluang tinggi untuk pembacaan algoritma sosial media sehingga postingan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka dapat mencapai *trending* teratas dan tidak menutup kemungkinan para *buzzer* ini juga melakukan hal semacamnya dalam penyebaran hoax negatif bagi para lawannya, berkebalikan dengan pihak yang ia dukung biasanya *buzzer* akan menciptakan postingan manipulasi berupa rekayasa-rekayasa fakta dan konten untuk mencapai citra positif kandidatnya. Di Indonesia, akun *buzzer* biasanya bisa dengan jelas dideteksi oleh Masyarakat umum. Akun-akun bodong seringkali digunakan dalam pelancarakan aksi *buzzing* diplatform-platform media sosial dikarenakan selain menjaga keamanan pemilik akun dengan penggunaan akun bodong ini *buzzer* akan mampu menciptakan komunikasi yang direkayasa secara dialektis dengan melakukan pelontaran pesan yang terkesan problematis dan menyudutkan. Para *buzzer* juga tak jarang rela membuat banyak akun untuk melakukan aksi tersebut.

Kemudian, dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi sendiri secara harfiah merupakan sebuah sistem yang memberikan wadah suara kepada rakyatnya yang menyebabkan kekuasaan tertinggi jatuh penuh kepada masyarakat pada suatu negara yang menganut sistem tersebut. Demokrasi sebagai sebuah system tidak hanya berfungsi sebagai pemecah konflik dalam pemerintahan, namun juga sebagai etos untuk mengupayakan konsensus secara deliberatif. Itulah mengapa, permasalahan seperti perbedaan pendapat dan eksistensi pihak yang memiliki oposan kepada kekuasaan pada hakikatnya bukan sebuah Tindakan antithesis terhadap demokrasi. Sehingga, demokrasi adalah keterbukaan dalam menyuarakan aspirasi kepada publik untuk mengendalikan jalannya kekuasaan.⁵ Berdasarkan konseptual ini adanya Tindakan *buzzing* dengan amplifikasi pesan, penyebaran hoax, bahkan hate speech terbukti telah mencederai demokrasi. Dalam melakukan ujaran informasi dan pengemukaan informasi haruslah berprinsip faktual dan terpercaya. Namun *buzzer-buzzer* yang bermunculan mengabaikan hal tersebut, kendati mereka lebih mementingkan kepentingan pihak diri mereka sendiri.

Propaganda politik secara massif dan jahat ini juga menggambarkan bahwa demokrasi yang berjalan sudah tercemar dengan ego politis yang tentunya dapat menimbulkan dampak keberlangsungan secara lebih fatal dikemudian seperti terbentuknya perpecahan beberapa kelompok Masyarakat, tata Kelola pemerintahan yang semu, serta ancaman disintegrasi bangsa yang sangat membahayakan masa depan negara. Fenomena *buzzer* dengan permainan liciknya ini menjadi sebuah momok menyeramkan bagi rakyat Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami hal serupa merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan serta risiko-risiko aksi *buzzer* politik terhadap bangsa Indonesia. Dengan berbagai bukti bahwa aksi *buzzer* politik dapat digolongkan sebagai pembajak dan perusak demokrasi tentunya juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan intensif oleh pemerintah agar kesewenangan parsial tidak akan menjadi pemimpin kendali kebijakan publik dimasa yang akan datang. Di Indonesia, urgensi ini dapat ditangani oleh pemerintah dengan melakukan sejumlah langkah seperti penguatan hukum perundangan-undangan terkait seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat para pelaku *buzzing* politisme yang menyeleweng. Mengingat dalam implementasi UU ITE

⁵ Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 146-148.

tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan aturan ini tidak dapat mengakomodir dinamika dan kompleksitas aktivitas para *buzzer* dalam berpolitik. Dengan begitu pemerintah juga dapat menambahkan kegiatan pendukung pembentukan demokrasi yang sehat seperti pelaksanaan program bimbingan literasi digital di berbagai konteks kehidupan. Selain itu, disisi lain dari regulasi yang sudah tercipta seperti UU ITE pihak berwenang seperti KPU juga dapat merancang beberapa aturan terkait pengelolaan *buzzer* dan kampanye diberbagai media termasuk media sosial dengan tetap mempertahankan hak-hak dan system demokrasi yang berjalan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini ialah bahwa *buzzer* telah menjadi komponen yang melekat dalam dunia politik khususnya pada masa- masa kampanye, kemunculan *buzzer* politik ini telah berevolusi menjadi entitas yang lama-kelamaan mengancam keberlangsungan bangsa dan negara dalam menjalankan demokrasi yang diterapkan. Implikasi negatif yang bermunculan seperti penyebaran hoax, manipulasi informasi, implifikasi pesan dan upaya-upaya propaganda negatif lainnya telah merusak dan menurunkan praktik demokrasi yang sehat dan menuntun negara kearah yang terancam. Dengan demikian, perlindungan serta penanganan terdapat integritas demokrasi sangatv penting dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan dan pengarahannya regulasi yang tepat, termasuk menguatkan UU terkait dan merancang aturan yang jelas atas pengelolaan *buzzer* dalam kampanye politik. Selain itu, pendidikan literasi digital juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya disinformasi seperti hoax yang banyak bertebaran karena ulah *buzzer*. Dengan demikian, demokrasi dapat terus dipertahankan sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan jalannya kekuasaan secara berkelanjutan secara tepat dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Arianto, “Salah Kaprah Ihwal Buzzer, Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial”, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5:1 (2020), hlm. 3.Pemilu.
- Firmansyah, Mas Agus, Siti Karlinah, dan Suwandi Sumartias, “Kampanye Pilpres 2014 dalam Konstruksi Akun Twitter Pendukung Capres”, dalam Jurnal the Messenger 9:1(2017), hlm. 79-90.
- Hootsuite and We Are Social. (2021). Digital in 2021: Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use In Indonesia. Retrived <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global>.*
- Otto Gusti Madung, Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 146-148.
- Rieka Mustika, “Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial, Shifting the Role of Buzzer to The World of Politics on Social Media”, dalam Jurnal Diakom, 2:2 (Desember, 2019), hlm. 152.